

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Islam di Indonesia merupakan proses yang berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan lainnya yang sangat kompleks. Untuk sebagian dapat diterangkan melalui keterlibatan kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad XI. Intensitas kontak - kontak perdagangan itu selanjutnya menghasilkan tumbuhnya pemukiman masyarakat muslim di pesisir Kepulauan Nusantara. Melalui proses sejarah yang sangat panjang, cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa lambat laun Islam telah menjadi bagian yang begitu dalam menguasai batin masyarakat Indonesia ( Haidar, 1994 : 1).

Meski demikian keberhasilan Islam menembus akar kehidupan masyarakat Indonesia, tidak berarti akar lama yang bersumber dari tradisi dan budaya setempat akan hilang sama sekali. Kondisi semacam ini juga bisa diamati di bagian lain di belahan bumi ini. Pergumulan Islam dengan budaya setempat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan sumber aslinya sendiri. Penghadapan Islam dengan realitas

sejarah akan memunculkan realitas baru, bukan saja diakibatkan pergumulan internalnya menghadapi tantangan yang harus dijawab, tetapi juga keterlibatannya dalam proses sejarah sebagai pelaku yang ikut menentukan keadaan zaman. Dalam proses seperti ini Islam tidak hanya harus menjinakkan sasarannya, tetapi dirinya sendiri terpaksa harus diperjinak. Dengan demikian akan terjadi keragaman dalam Islam ( Haidar, 1994 : 1 ).

Dari sisi inilah barangkali yang melatarbelakangi munculnya beberapa Ormas Islam sesuai dengan sosio kulturalnya. Maka muncullah seperti; Masyumi, SI, PSII, Perti, Al Irsyad, NU, dan Muhammadiyah. Dan dua terakhir inilah yang tetap mendominasi corak dan dinamisasi ajaran Islam di Indonesia hingga saat ini. Bahkan di antaranya ada yang terjun ke gelanggang politik praktis pada pasca kemerdekaan menjadi Partai Islam.

Adapun berdirinya Partai Islam pada masa kemerdekaan perlu dilihat dengan latar belakang perkembangan politik di Indonesia pada masa yang bersangkutan. Ini akan memungkinkan kita untuk melakukan penilaian tentang kedudukan partai kekuatan dan kelemahannya, disamping tentunya melihat kemampuan pemimpinnya serta struktur partai itu sendiri ( Noer,

sebagai resiko dari kemajuan spektakuler ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berusaha mencari perspektif baru sebagai refleksi dari klaim universal agama yang memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia dari hempasan pertarungan berbagai kepentingan manusia dalam menapaki masa depan yang makin sulit diantisipasi ke arah mana titik pemberhentian yang hendak dituju ( Karim, 1992 : 75 ).

Dalam hal ini Ormas Islamlah yang paling nampak dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sehingga terjadilah seperti apa yang telah kita ketahui bersama saat ini dimana NU mengklaim dirinya sebagai Ormas Islam untuk Kaum Konservatif sedangkan Muhammadiyah menganggap dirinya sebagai Kaum Reformis. Adapun tujuan utama dari kedua ormas ini adalah sama, yaitu berusaha mensosialisasikan ajaran agama ( Islam ) dan memantapkannya ke relung hati umat agar terhindar dari pencampuradukan dengan ajaran - ajaran lain yang dianggap sekuler dan membahayakan aqidah. Sehingga tidak akan terjadi *sinkritisme* dalam aktualisasi ajaran agama.

Akan tetapi akhir - akhir ini kedua ormas ini telah sama - sama menyadari betapa tidak sebanding antara kemampuan dan potensi diri untuk berhadapan dengan dunia yang senantiasa dinamis, sehingga tatanan

organisasi yang ada pada masing - masing ormas tidak sama dalam merealisasikan peranannya di tengah - tengah masyarakat. Oleh karena itu adanya keinginan saling mendekat antara NU dan Muhammadiyah, terutama setelah kedua ormas besar ini sepakat untuk mengadakan muktamar dalam waktu yang relatif berdekatan di Kota Yogyakarta, merupakan suatu kemajuan yang luar biasa yang tidak pernah diramalkan orang sebelumnya mengingat masing - masing memiliki pendirian yang sulit untuk dikompromikan sebagai konsekuensi logis dari cara pemahaman agama yang bertolak dari sudut pandang yang berbeda - beda.

Muhammadiyah lahir, di satu pihak sebagai upaya mengatasi stagnasi, bahkan kejumudan berfikir di kalangan umat Islam serta sekaligus mencari jalan baru untuk mengatasi penetrasi budaya yang terlalu jauh dimana pada akhirnya menggerogoti kemurnian ajaran Islam. Karena itu jalan yang dipilih Muhammadiyah tidak lain adalah reformasi dan purifikasi, pembaharuan dan pemurnian.

Reformasi bertumpu pada penumbuhan spirit berfikir di dalam memahami teks - teks ajaran normatif Islam, yaitu optimalisasi potensi berfikir dalam rangka mengaktualisasikan ajaran - ajaran tersebut dengan menggunakan logika berfikir induktif. Dengan



jarak, maka jurang pemisah antara kedua aliran ini semakin melebar, lebih - lebih setelah kedua ormas ini melibatkan diri dalam kancah politik praktis, masing - masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan politik kelompoknya, tak ayal lagi konflik antara keduanya semakin kentara. Bahkan lahirnya partai NU di tahun 1952 salah satu penyebab utamanya adalah karena kelompok konservatif ini merasa diabaikan oleh kelompok modernis di dalam Masyumi. Dengan kata lain kepentingan atas nama politik makin memperparah konflik karena bertambah membengkaknya potensi konflik terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh akses ke dalam kekuasaan. Manuver - menuvernya bisa dilihat dalam tubuh Departemen Agama sebagai satu - satunya ajang untuk memperjuangkan kepentingan agama bagi kedua kubu tersebut.

Dari sisi inilah NU memiliki sejarah yang panjang keterlibatannya dalam politik benar - benar intens bak darah dengan daging dan tulang, sehingga NU disebut sebagai Kelompok Akomodasionis. Bisa bekerja sama dengan kelompok politik manapun asalkan kepentingannya dalam politik praktis dapat terakomodasikan. Untuk itu NU mengerahkan segenap potensi dan tenaganya ke bidang politik tiga setengah dasawarsa. Sebagai konsekuensinya tentu NU tidak

sempat melakukan langkah - langkah konseptual tentang pembinaan jama'ahnya kecuali yang langsung menunjang kepentingan politiknya. Demikianlah kenyataan sejarah NU sampai lahirnya Orde Baru.

Di lain pihak Muhammadiyah yang tidak lagi memiliki wadah afiliasi politik pasca Masyumi dibubarkan, tampak dipaksa keadaan untuk meninjau kembali keterlibatannya di dalam realisme politik. Memang Muhammadiyah juga agaknya lengket hubungannya dengan Soeharto<sup>karno</sup> dalam era Orde Lama. Tetapi manuver politiknya jauh tidak berarti jika dibandingkan dengan NU. Barulah ketika Orde Baru lahir, Muhammadiyah kembali memutar haluan ke gelanggang kancah politik praktis. (Karim, 1992: 77)

Bagaimanapun ternyata antara NU dan Muhammadiyah memang sulit untuk berjalan di jalur dan visi yang sama, kendatipun arah dan tujuannya tetap satu yaitu untuk menyebarluaskan pesan - pesan suci ajaran Islam. Cara pandang dan metode yang berbeda menyebabkan pula ketidaksamaan atas hasil karya atau produksi hukum kedua ormas ini. Muhammadiyah yang memilih jalan reformasi dan purifikasi di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama adalah langsung pada dua sumber hukum utama yaitu Al Qur'an dan Hadits. Yang berarti optimalisasi potensi berfikir dalam rangka

mengaktualisasikan ajaran - ajaran tersebut dengan menggunakan logika berfikir induktif ( Karim, 1992 : 76 ).

Sedangkan NU tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqh baik kerangka teoritis ( ushul fiqh ) maupun kaidah - kaidah fiqh ( al qawaidul fiqhiyah ). Dengan tradisi pemikiran ini NU mencoba memberi jawaban terhadap tantangan perubahan yang dihadapi untuk melembagakan nilai - nilai baru serta tingkah laku dan peran sosial politiknya. Oleh karena itu analisis yang disajikan mencoba mengungkapkan dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam NU serta bagaimana refleksinya dengan tradisi pemikiran fiqh itu. Analisis dengan kerangka pemikiran tersebut diharapkan dapat memahami rekonstruksi pola perubahan dan dinamika NU menghadapi tantangan problematika sosio kultural dan politik ( Haidar, 1994 : 8 ).

Untuk mengetahui sejauh mana pola kepemimpinan ~~Ormas Islam~~ <sup>NU dan Muhammadiyah serta</sup> berpengaruh terhadap fiqh dalam pendekatan politik di Indonesia, maka diperlukan suatu kajian, telaah, dan analisa konseptual tentang hal itu.

**B. Pembatasan Masalah**

Kajian ini akan membahas dan menelaah tentang pola kepemimpinan NU dan Muhammadiyah serta pengaruh-

nya terhadap fiqh di Indonesia. Sehingga dengan demikian stressing pembahasan dalam tulisan ini hanya pada pola kepemimpinan dan produk fiqhnya dengan mengesampingkan pembahasan tentang hal - hal lain selain pola kepemimpinan dan mekanisme istimbath hukum.

### C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi pola kepemimpinan dewasa ini ?
2. Sejauh mana defferensiasi mekanisme istimbath hukum antara NU dan Muhammadiyah di dalam menghadapi berbagai persoalan ?
3. Sejauh mana pola kepemimpinan <sup>NU dan Muhammadiyah</sup> ~~Ormas Islam~~ berpengaruh terhadap aplikasi fiqh di lingkungan masyarakat ?

### D. Kajian Pustaka

#### 1. *Kepeimpinan Dalam Muhammadiyah*

H. A. Mukti Ali dalam bukunya *METODE MEMAHAMI AGAMA ISLAM* menyebutkan bahwa figur yang pantas untuk memimpin Muhammadiyah adalah pimpinan dari



figur ulama'. Karena kalau dilihat dari dasarnya, Muhammadiyah itu adalah organisasi agama ( Ali, 1991 : 111). Dia menambahkan bahwa Muhammadiyah itu tidak pantas jika dipimpin oleh tokoh yang hanya pandai atau ahli dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan untuk menjangkau itu semua, maka dibentuklah majlis - majlis sesuai dengan bidang dan garapan masing - masing.

Pendapat dari Mukti Ali di atas sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai kriteria yang diinginkan oleh Muhammadiyah sendiri di dalam menentukan pimpinannya. Sebagaimana dikatakan oleh AR. Fakhruddin bahwa kriteria pemimpin Muhammadiyah -- yang disimpulkan oleh Mukti Ali menjadi wujud seorang ulama' -- tersebut di atas merupakan prasyarat keberhasilan Muhammadiyah dalam usahanya untuk mengikuti akhlaq Rasulullah ( Fakhruddin, 1995 : 186 ). Oleh karena itu untuk mencapai maksud tersebut, maka yang dilakukan oleh pemimpin Muhammadiyah adalah sebagaiberikut :

1. Memahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits.
2. Memahami Al Qur'an dengan tafsirnya dan Hadits dengan rangkaiannya.
3. Memperhatikan berbagai kecenderungan dan peruba-

han masyarakat Indonesia yang sedang berada pada tahap tinggal landas.

4. Memiliki pemikiran yang maju selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.
5. Mampu menyusun program persyerikatan dan amal usahanya dalam upaya mencapai tujuan Muhammadiyah ( Fakhruddin, 1995 : 186-187 ).

Sementara KH. Ahmad Azhar Basyir melihat masalah kepemimpinan dalam Muhammadiyah ini secara lebih jauh ke depan. Dia lebih melihat dari aspek proses pendidikan yang dilalui oleh seorang kader. Apabila latar pendidikannya -- baik formal maupun tidak -- memang mendukung dalam usahanya untuk menjadi seorang cendekiawan yang sampai pada tingkatan ulama', maka jalur itulah yang semestinya ditempuh oleh banyak kalangan kader - kader muda Muhammadiyah dengan AMM-nya. Azhar Basyir dalam bukunya *REFLEKSI ATAS PERSOALAN KEISLAMAN SEPUTAR HUKUM, FILSAFAT, POLITIK DAN EKONOMI*, menyatakan bahwa jika pola pendidikan yang ditempuh itu mengikuti SKB tiga menteri yang memberikan 70 % ilmu umum dan 30 % ilmu agama, barangkali sulit mencapai target yang hendak dicapai oleh Muhammadiyah dalam rangka mempersiapkan kader pemimpin masa depan. Oleh karena itu pola pendidikan seperti madrasah

program khusus yang diselenggarakan Oleh Departemen Agama dengan komposisi kurikulum 70 % ilmu agama dan 30 % ilmu umum itu patut dipertimbangkan, mengingat gambaran memenuhi harapan melahirkan kader ulama' lebih mungkin dan lebih jelas ( Basyir, 1996 : 273 ).

Menanggapi kondisi semacam ini, nampaknya Djoko Susilo dan Nadjib Hamid ikut memberikan sentilan - sentilan pedas dengan kritikan - kritikan tajam yang dimuat di harian Jawa Pos berturut - turut Kamis dan Jum'at Desember 1992 tentang "Krisis Eksistensial di kalangan AMM ( Angkatan Muda Muhammadiyah )".

Akan tetapi tulisan itu kemudian ditanggapi oleh Amien Rais dalam bukunya *MORALITAS POLITIK MUHAMMADIYAH*, bab Kaderisasi Muhammadiyah hal. 77 Amien Rais menyatakan bahwa memang ada masalah - masalah mendasar dalam soal kaderisasi Muhammadiyah. Akan tetapi krisis yang dialami saat ini sebenarnya belum sampai pada batas krisis eksistensial ( 1995 : 79 ). Dalam bukunya itu juga ia memberikan jalan keluar untuk mengatasi krisis yang sedang dialami. Dia mengatakan bahwa pendalaman agama, mempertinggi ilmu, bekerja keras dan tekun membaca merupakan garis - garis besar peningkatan

kualitas AMM.

Dalam tulisan - tulisan di atas memang telah banyak menyinggung persoalan kepemimpinan dalam Muhammadiyah baik itu sejak penggemblengan mulai dini hingga keharusan - keharusan yang mesti dilakukan oleh pemimpin Muhammadiyah. Pada tataran idealis Mukti Ali telah melontarkan pendapat bahwa pemimpin Muhammadiyah haruslah seorang ulama'. Akan tetapi ulama yng bagaimana yang pantas memimpin Muhammadiyah dengan predikat sebagai organisasi gerakan pembaharuan dalam Islam, dia belum memaparkan secara jelas. Apalagi organisasi ini selalu mengikuti alur perkembangan dan perubahan zaman. Di samping itu pula dia tidak menjelaskan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh seorang ulama'. Sebab sebagaimana kita maklumi bahwa ada ulama' yang hanya berlatar belakang pendidikan pesantren dengan pola pendidikan yang monoton dan ada pula ulama' yang background pendidikannya yang mengkombinasikan sistem klasik dan modern, sehingga muncullah istilah "ulama' plus". Kriteria - kriteria semacam itu tentunya juga berpengaruh terhadap pola kepemimpinan seseorang yang tidak menutup kemungkinan juga berpengaruh terhadap putusan - putusan fiqh oleh Majlis Tarjih.



Sedangkan Azhar Basyir memang telah menyinggung tentang proses pendidikan yang dialami oleh kader - kader pemimpin Muhammadiyah. Akan tetapi beliau belum memberikan suatu ketegasan pendapat bahwa pola madrasah khusus yang dilakukan oleh Departemen Agama itulah yang harus diikuti. Akhirnya krisis kader dalam AMM seperti yang dilontarkan Djoko Susilo dan Nadjib Hamid -- yang kemudian ditanggapi oleh Amien Rais -- itu barangkali bisa dipahami sebagai rasa kekhawatiran. Namun Amien rais belum melihat lebih jauh kenapa kekhawatiran dan kritikan itu muncul. Tentunya hal itu berdasarkan data empirik yang faktual.

Sementara itu AR. Fakhruddin hanya memberikan beberapa kriteria pemimpin yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Padahal dari ketentuan kriteria itu juga akan memberikan corak tersendiri terhadap sang pemimpin sebagai individu. Konsekwensi itulah sebenarnya yang belum terjamah dalam tulisan AR. Fakhruddin tersebut.

## 2. *Kepemimpinan Dalam NU*

Suatu hal yang membedakan antara NU dan Masyumi adalah bahwa kebebasan lebih terlihat pada Masyumi. Sedangkan ketaatan kepada yang lebih tua

apalagi ulama' lebih merupakan ciri khas NU ( Noer, 1987 : 114 ). Begitulah Deliar Noer menulis dalam bukunya Partai Islam di Pentas Nasional 1945 - 1965. Dia menambahkan bahwa tokoh NU yang berlatarbelakang pesantren sulit untuk ditampilkan dalam bidang - bidang selain bidang agama. Sedangkan bidang garapan NU tidak hanya terletak pada bidang agama saja, melainkan termasuk juga bidang sosial politik, ekonomi dan sebagainya. Maka untuk mencapai pada target bidang - bidang tersebut NU terpaksa merekrut cendekiawan yang sebelumnya tidak dikenal keterikatannya pada Islam, seperti Sunarjo dan Burhanuddin yang kedua - duanya sarjana hukum dan sama - sama menjadi menteri. Padahal sebelum menjadi menteri mereka ini tidak pernah menjadi tokoh NU. Kedudukan mereka dalam pemerintahan tampaknya hanya berdasarkan saling memerlukan antara mereka dan NU. Memang dahulu NU kekurangan tenaga intelektual. Hal ini merupakan salah satu sebab berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 1956 ( Noer, 1983 : 114 ). Pengamatan Deliar Noer memang beralasan tentang krisis intelektual dan cendekiawan di kalangan NU pada masa lalu. Akan tetapi yang perlu juga kita amati adalah keberadaan NU yang merupakan Ormas Islam

terbesar di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan sekat - sekat yang menumbuhkan rasa ketertarikan dari pihak supra struktur ( pemerintah ) sendiri untuk ikut andil dalam proses pembangunan bangsa ini dengan memberikan kedudukan yang layak di lembaga pemerintahan kepada tokoh - tokoh NU. Melihat kondisi semacam itu relatifitas kemungkinan bisa jadi orang luar berafiliasi dan bergabung dengan NU yang memungkinkan dia tampil sebagai tokoh yang diperlukan oleh Pemerintah. Celah seperti inilah yang sebenarnya belum ditelusuri oleh Deliar Noer. Di samping itu, ketika pemimpin NU -- termasuk juga Ormas Islam lainnya -- telah masuk terlampaui jauh dalam sebuah sistem, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap independensi kekuatan organisasinya. Demikian pula dapat mewarnai terhadap corak kepemimpinan dan kebijakan - kebijakan yang diambilnya.

Sementara itu Dr. H. Saleh Al Jufri dalam bukunya *POLITIK NU DAN ERA DEMOKRATISASI GUS DUR*, menulis tentang manuver - manuver yang dilakukan Gus Dur selama ini, terutama menjelang Pemilu 1997. Sebenarnya tulisan Saleh Al Jufri itu bermula dari sebuah kebingungan untuk memahami siapa Gus Dur -- tokoh NU -- itu sebenarnya. Dulu dia sangat

berpengaruh terhadap masalah fiqhiyah.

2. Mengetahui pengaruh pola kepemimpinan NU dan Muhammadiyah terhadap aplikasi fiqh di Indonesia melalui pendekatan politik.

#### **F. Kegunaan Studi**

Kegunaan studi yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan Islam agar menjadi bacaan yang berguna masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mendalami tentang Islam di Indonesia
2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya, khususnya studi keislaman dan umumnya terhadap permasalahan yang berkait.
3. Dalam aspek praktis, kiranya hasil studi ini menjadi salah satu penuntun bagi mereka yang ingin mengetahui keberadaan fiqh yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan keadaan, serta selaras dengan perkembangan zaman.

#### **G. Sumber Data**

Sumber data yang dipilih meliputi sumber data primer dan sekunder. Dalam pengertian Winarno Surakhmad ( 1990 : 134 ), sumber primer adalah sumber



tangan pertama peneliti. Sedangkan sumber sekunder berisi data dari tangan kedua dan seterusnya yang bagi peneliti tidak mungkin berisi data yang seasli sumber pertama ( primer ).

Sumber data primer yang dimaksud antara lain:

1. Partai Islam di Pentas Nasional, oleh Deliar Noer.
2. NU dan Islam di Indonesia, oleh M. Ali Haidar.
3. Islam dan Konflik Politik Era ORBA, oleh Rusli Karim.
4. NU, Tradisi, Relasi - Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. oleh Martin Van Bruinessen.
5. Hukum Islam di Indonesia, oleh Prof. Dr. H. Rakhmat Djatmika, dkk.
6. Teori Politik Islam, oleh Dr. Khalid Ibrahim Jindan
7. Masyarakat Indonesia Abad XXI Dalam Politik Ulama' Sebagai Gerakan Moral, oleh Mun'in DZ.
8. Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman, oleh Dr. M. Amin Abdullah.
9. Pengantar Hukum Islam, oleh Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddiqy.
10. Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia. oleh Abdul Qadir Djaelani.
11. NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah Dengan Muhammadiyah, oleh Moh. Zen dan Khoirul Fathoni.

12. Kaidah - Kaidah Hukum Islam ( Ushul Fiqh ), oleh Abdul Wahab Khallaf.
13. Memahami Politik Umat Islam Indonesia, oleh Ali Masykur Musa.
14. Dinamika kepemimpinan Islam Dalam Era Orde Baru, oleh Ridwan Saidi.
15. Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, oleh Abdurrahman dan Syamsul Wahidin.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini digunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1. Sosiohistoris, yaitu suatu metode yang dipakai untuk memperoleh bahan melalui pendekatan sosial dan sejarah terutama yang erat kaitannya dengan pokok bahasan.
2. *Content analysis*, yaitu menganalisa buku - buku maupun tulisan - tulisan yang ada selama ini yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

Sedangkan metode analisisnya sebagai berikut :

1. Induksi, yakni mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka ( *library research* ) selanjutnya digeneralisir sebagai suatu

- kesimpulan.
2. Deduksi, yaitu memberikan dalil - dalil atau hujjah secara khusus terhadap pengertian umum yang telah dikemukakan sebelumnya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini Penulis akan mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab paling awal dalam skripsi ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari ; perumusan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, Kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, sumber data, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II merupakan landasan teori yaitu tentang Tinjauan Umum mengenai hukum Islam. Pembahasannya meliputi: pengertian, sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas dan prinsip hukum Islam, macam - macam hukum Islam dan madzhab - madzhab dalam hukum Islam.

Dalam bab III merupakan kajian tentang keberadaan Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Pembahasan tentang NU difokuskan pada : latar belakang berdirinya yang terdiri dari semangat Nasionalisme , latar belakang Internasional.